



Pembangunan Ekonomi Dalam Pembangunan Sosial di Indonesia: Analisis atas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

Hamdan Hamdani^{1*}, Ninda Rosmawati²

^{1,2}Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

* Corresponding Author. E-mail: hamdanhamdani001@gmail.com

Received: 22 Okt 2020.; Revised: 7 Mar 2023; Accepted: 31 Mar 2023

Abstract: Implementing the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program, designed to help the poor, is related to the goal of sustainable economic development in the country. This research aims to identify the logical reasons for the BPNT assistance program contributing to the country's economic development. To achieve this goal, the study uses a sample of the BPNT implementation in Kubang Village, Talun Sub-district, Cirebon Regency. The implementation of the BPNT program was explored through interviews, observations, and documentation techniques supported by qualitative methods. Data were analyzed using Todaro and Smith's economic development approach. The research reveals that the program is implemented following the guidelines but faces obstacles related to the regularity of fund disbursement. The BPNT program, which aims to ensure survival by providing food and improving welfare, is conceptualized through the virtuous circle model. The implementation of non-cash assistance to the community positively impacts sustainable economic improvement in the country.

Keywords: BPNT Program, Community Welfare, economic development

Abstrak: Pelaksanaan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diselenggarakan untuk membantu masyarakat miskin berkaitan dengan tujuan pengembangan ekonomi negara secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alasan logis program bantuan BPNT dalam peningkatan pembangunan ekonomi negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan sampel pelaksanaan BPNT di desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Implementasi program BPNT ditelusuri dalam penelitian ini melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didukung dengan metode kualitatif. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi Todaro dan Smith. Penelitian ini menghasilkan pelaksanaan program yang berjalan sesuai dengan pedoman dengan hambatan pada keteraturan pencairan dana. Program BPNT yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup dengan penyediaan pangan agar meningkatkan kesejahteraan dikonsepsi melalui model *virtuous circle* (lingkaran baik). Penerapan bantuan non tunai kepada masyarakat memiliki dampak peningkatan ekonomi berkelanjutan pada negara.

Kata Kunci: BPNT, Kesejahteraan Masyarakat, pembangunan ekonomi



PENDAHULUAN

Peningkatan masyarakat miskin di Indonesia pada tahun 2019 yang mencapai 0,56% (Badan Pusat Statistik, 2020) mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang salah satunya dengan menyelenggarakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya yang berkaitan dengan pangan. Sasaran program ini ditujukan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai taraf yang dianggap manusiawi (Arsyad, 2010, p. 299) dan dianggap sebagai kelompok yang tidak menguasai sarana-sarana fisik (Wiratman, 1987, p. 37). Kriteria kelompok miskin dipenuhi oleh Masyarakat Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang didasarkan pada data tahun 2015 (Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Cirebon, 2015), sehingga mereka termasuk dalam wilayah yang mendapatkan bantuan non pangan.

Pelaksanaan program tidak hanya ditujukan untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, akan tetapi sebagai upaya membentuk masyarakat yang terpenuhi kebutuhan mendasarnya yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan. Langkah penyediaan bentuk dalam bentuk pangan menjadi ukuran bagi banyak negara dalam membentuk karakter masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya (*sustenance*) dan terhindar dari mental “mengemis”. Efektivitas program bantuan non tunai disebutkan Boston (2019) berdampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Penelusuran terhadap kepentingan peningkatan kesejahteraan yang terkandung dalam kebijakan BPNT ditinggalkan oleh banyak peneliti. Beragam penelitian hanya terfokus pada aspek implementasi dari pelaksanaan program (Djaenal et al., 2021; Hasimi, 2020; Julianto, 2020), hambatan pelaksanaannya (Hutagalung et al., 2022), dan evaluasi terhadap pelaksanaan program (M. Noor et al., 2022; Parhusip, 2019; Rosaliana & Hardjati, 2019). Analisis terhadap hubungan program bantuan dengan menyediakan sumber pangan yang dibutuhkan dengan peningkatan kesejahteraan diabaikan oleh banyak peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan logika mendasar pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan memberikan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat (Apatinga et al., 2021), sehingga berdampak pada peningkatan semangat untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk menemukan kesinambungan pemberian bantuan pangan terhadap peningkatan taraf hidup,

penelitian ini menentukan dua aspek utama; (1) bagaimana pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon? (2) bagaimana konsep dasar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditinjau dari teori Pembangunan Ekonomi? Dua pertanyaan ini menjadi konstruksi dasar yang digunakan dalam penelitian untuk menemukan logika dasar program BPNT di Desa Kubang.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan pemerintah melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan aspek sosial membutuhkan kestabilan ekonomi negara. Arah orientasi kebijakan yang hanya menekankan pada satu aspek mempengaruhi kestabilan aspek lainnya. Dalam konteks ini, Myrdal (1957) berargumen bahwa penentuan arah kebijakan pada satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lainnya dalam makna positif ataupun negatif (*vicious and virtuous circles*). Penekanan atas satu kebijakan berkorespondensi dengan peningkatan terhadap kebijakan yang lainnya. Hubungan ini membentuk serangkaian hubungan yang melingkar dengan legitimasi negara sebagai aktor yang dapat mengintervensi arah kebijakan satu untuk meningkatkan kebijakan yang lain (Hirvilammi, 2020). Intervensi terhadap pengentasan kemiskinan melalui kebijakan BPNT berkaitan dengan peningkatan ekonomi berkelanjutan sebagai dasar implementasi kebijakan sosial.

METODE PENELITIAN

Pengukuran terhadap efektivitas dan implikasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dipertimbangkan karena cakupan metode ini mampu data deskriptif yang dihasilkan dari perilaku dan pernyataan yang diamati dalam proses penelitian (Tanzeh, 2011, p. 40). Penelitian ini menggunakan dua jenis data; sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari aktivitas implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kubang, Cirebon. Sedangkan sumber data sekunder dihasilkan dari beragam dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi program bantuan pangan non tunai.

Pengambilan data dari sumber data yang ditentukan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik; observasi, wawancara, dan dokumentasi (J. Noor, 2011, p. 56). Wawancara dalam penelitian ini mengambil sampel pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, seperti penanggung jawab program, keluarga penerima bantuan, dan

petugas e-warong. Hasil data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori kesejahteraan masyarakat yang dikenalkan oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. Teori ini memberikan deskripsi terhadap beragam aspek kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan menyorot pada tingkat kebutuhan dasar, tingkat kehidupan, perluasan skala ekonomi, dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Todaro & Smith, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Realisasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) didasarkan pada hasil Rapat Terbatas Presiden RI tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi. Program ini ditujukan sebagai pengganti dari program bantuan Beras Sejahtera (rastra) untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Dalam aspek implementasinya, penyaluran bantuan pangan non tunai diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan sasaran daerah terpilih melalui pertimbangan ketersediaan akses dan fasilitas pendukung program. Pemilihan bantuan pangan ditujukan untuk memberikan pilihan kebutuhan pokok yang lebih luas dengan penyalurannya melalui sistem perbankan agar lebih produktif dan fleksibel. Sistem perbankan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan akumulasi aset dan akses layanan keuangan yang lebih luas. Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan menggunakan *e-voucher* yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang dibutuhkan (BPNT, 2017).

Efektivitas program dengan memperbaiki sistem penyaluran dinilai memiliki kekurangan dalam wilayah implementasinya. Kharismawati dan Rosdiana (2018) menemukan hambatan dalam penggunaan mesin EDC di e-warong. Hambatan ini juga diperkuat dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan perangkat yang berbasis elektronik dan jangkauan *signal* yang terbatas (Rachman et al., 2018). Penekanan terhadap beragam kecurangan yang muncul dalam kebijakan bantuan melalui sistem elektronik tidak berjalan signifikan. Nabila et al. (2021) menemukan beragam kecurangan terjadi yang berkaitan dengan realisasi bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan BPNT yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih dirasakan oleh penerima manfaat (Gultom et al., 2020). Pengadaan bantuan pangan juga dinilai sebagai langkah taktis pemerintah

untuk menjamin pemenuhan gizi masyarakat (Julianto, 2020). Implementasi kebijakan yang tepat dan efektif berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kebijakan yang efektif dapat membawa perubahan positif pada lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Tugas ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Implementasi kebijakan yang berfokus pada pemberian bantuan sosial dianggap sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Damima et al., 2022). Pembentukan masyarakat yang sejahtera menekankan pada aspek kesetaraan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial. Program BPNT merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masyarakat yang sejahtera berdampak pada peningkatan partisipasi mereka dalam proses pembangunan (Sombang, 2021). Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkatkan kemandirian dan kapasitas mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan yang tidak memperhatikan prinsip kesejahteraan sosial juga dapat berdampak buruk pada kesejahteraan sosial masyarakat.

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program yang dilaksanakan guna penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta pelayanan dasar (BPNT, 2017). Dalam penyalurannya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan secara non-tunai dengan menggunakan sistem perbankan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini merupakan perubahan dari program penyaluran Beras Sejahtera (rastra) yang dikonversi penyalurannya melalui kupon elektronik (*e-voucher*) agar lebih tepat sasaran dan dapat dikontrol dengan mudah (BPNT, 2017).

Pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Kubang disalurkan melalui elektronik warung gotong royong (*e-warung*) sebagai mitra resmi yang sesuai dengan pedoman bantuan (Pusat, 2011). Penyaluran bantuan di Desa Kubang ditangani oleh Warung Kubang Mandiri yang telah bekerja sama dengan Bank penyalur bantuan (Toni, 2020). Besaran bantuan yang diberikan ditentukan sebesar Rp. 200.000 yang disalurkan dalam bentuk bahan pangan. Yuyun (2020), selaku petugas *e-warung* menyatakan bahwa

pemberian bantuan tidak dapat diberikan dalam bentuk tunai, akan tetapi berupa kupon yang dapat ditukarkan dengan beras sebanyak 12 kg, telur 1 kg, kacang-kacangan sebanyak ½ kg, kentang sebanyak 1 kg, dan buah Apel sebanyak ½ kg. Jumlah bantuan yang telah ditentukan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat. Kecukupan ini terkonfirmasi dari pernyataan Suliherni, sebagai keluarga penerima manfaat,

Alhamdulillah kalau beras *segitu* cukup kan dapatnya juga sekarang ya, sudah beberapa bulan ini saya tidak beli beras, *dicukup-cukupin*, kebetulan sekarang berasnya bagus jadi tidak perlu dicampur sama beras jenis lain lagi, dan telur juga alhamdulillah cukup kalau setiap mau dapat lagi di bulan depan baru telur itu habis, paling kita ya beli sayuran yang lain *aja* (Suliherni, 2020).

Besaran bantuan yang salurkan oleh e-warong sebagai mitra dalam penyaluran bantuan telah sesuai dengan pedoman yang ditentukan.

Kesesuaian implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) didukung dengan jaminan kualitas dan mekanisme penyaluran. Suliherni mengapresiasi kualitas beras yang disalurkan.

Ya kalau kualitas dari bantuan itu sih bagus, sudah beberapa bulan ini juga berasnya bagus *alhamdulillah*, terkadang ada berasnya kurang bagus terus harus dicampur sama beras bagus, tapi alhamdulillah sekarang – sekarang tidak harus dicampur lagi berasnya (Suliherni, 2020).

Di samping jaminan terhadap kualitas bantuan, mekanisme pendistribusian bantuan berlangsung sesuai dengan pedoman. Bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat disalurkan tanpa ada pemungutan biaya yang sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah (Observasi, 2020). Jaminan kualitas dan pendistribusian yang berlangsung di Desa Kubang menunjukkan pelaksanaan BPNT berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.



Gambar 1. Bahan Pangan dan Penyaluran BPNT

Meskipun demikian, cakupan penerima bantuan dan tenggang waktu bantuan membutuhkan perhatian lebih. Toni mengonfirmasi bahwa sasaran keluarga penerima bantuan masih didasarkan pada pendataan yang belum diperbaharui, sehingga ketepatan penerima manfaat bantuan masih dinilai kurang.

Ya kalau dikatakan tepat sasaran 100% *sih* belum ya, karena kan data itu diambil dari tahun lama, tapi setidaknya cukup membantu walau tidak dapat dikatakan sempurna, oleh karena hal ini maka memicu timbulnya kecemburuan sosial (Toni, 2020).

Kecemburuan sosial yang muncul diperparah dengan jadwal pembagian bantuan yang tidak sesuai. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang seharusnya di distribusikan setiap bulan mengalami keterlambatan pada jenjang periode Agustus hingga September 2020.

Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kubang menunjukkan upaya perubahan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pengurangan kesenjangan sosial masyarakat. Terdapat dua kecenderungan implementasi kebijakan BPNT. *Pertama*, perubahan arah kebijakan. Kebijakan bantuan pemberian beras secara langsung direvisi dengan memperluas cakupan bantuan melalui distribusi pangan yang dibutuhkan masyarakat. *Kedua*, penekanan terhadap nilai pembangunan ekonomi. Dua kecenderungan yang menjadi semangat program bantuan pangan non tunai memberikan dampak pada peningkatan pandangan hidup masyarakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan oleh Negara.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu hidup tergambar dalam upaya konversi bantuan langsung berupa beras menuju bantuan pangan yang beragam. Bentuk bantuan yang difokuskan pada kebutuhan masyarakat sehari-hari dibandingkan bantuan uang tunai menunjukkan fokus pengembangan pemerintah pada distribusi pangan. Langkah ini berkesesuaian dengan prinsip utama dalam pengembangan masyarakat yang mencakup pemenuhan kebutuhan sehari-hari (*sustenance*), penghargaan terhadap kemanusiaan, dan tidak bergantung pada orang lain (Todaro & Smith, 2014). Penyediaan pangan terhadap masyarakat miskin memberikan jaminan peningkatan kualitas hidup. Todaro dan Smith (2014) mengklaim ketersediaan dan distribusi pangan merupakan bagian dari tujuan pembangunan masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Melalui perubahan kebijakan dengan sasaran masyarakat yang dinilai kurang mampu mengindikasikan pelaksanaan program BPNT terfokus pada distribusi

pangan untuk menunjang kecukupan gizi dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT, 2019).

Implementasi program BPNT di Desa Kubang mengindikasikan upaya pengentasan kemiskinan melalui pengurangan kesenjangan sosial masyarakat dengan memberikan bantuan pangan non tunai yang lebih luas dan memperhatikan nilai pembangunan ekonomi. Dengan memberikan bantuan pangan yang dibutuhkan masyarakat, program ini meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata. Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi menghasilkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2014). Penyediaan sumber daya pangan secara merata melalui program BPNT berkontribusi dalam penanggulangan kesenjangan sosial masyarakat di Desa Kubang. Hal ini disebabkan dampak yang sinergis antara pemerataan ekonomi dengan pengurangan kesenjangan yang ditunjukkan dalam beragam teori pembangunan ekonomi (Škare & Družeta, 2016). Pelaksanaan program BPNT di Desa Kubang menjadi contoh implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi.

Menentukan Arah Kebijakan Ekonomi dalam Kebijakan Sosial pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Perubahan kebijakan program beras sejahtera menuju program bantuan pangan non tunai terhadap masyarakat di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon diimplementasikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Distribusi bantuan dilakukan melalui e-warong yang ditunjuk sebagai mitra penyaluran bantuan yang bekerja sama dengan Bank sebagai penyedia dana. Bantuan disalurkan berupa kupon yang ditukarkan dengan bahan pangan yang menjadi kebutuhan keseharian masyarakat. Kesesuaian penyaluran bantuan pada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan (Ariyanti et al., 2021). Meskipun, implementasi bantuan terkendala oleh ketepatan waktu penyaluran dan pendataan keluarga sasaran yang masih tidak tepat, akan tetapi pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin yang menjadi tujuan program ini tercapai. Masyarakat Desa Kubang merasa terbantu dengan keberadaan program bantuan pangan non tunai sebagai program pengganti dari bantuan beras sejahtera.

Perubahan program yang dilakukan sebagai upaya memberikan jaminan ketersediaan kebutuhan masyarakat di desa Kubang menunjukkan basis dasar program sebagai upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi. Peningkatan

produktivitas tergambar dari penyediaan sumber daya pangan yang dapat mempermudah akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Langkah ini berkesesuaian dengan pengembangan pertumbuhan ekonomi yang terfokus pada perbaikan aspek produksi (Smith, 2007). Efisiensi produksi dalam bentuk penyediaan bahan pangan juga berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi negara. Hal ini ditunjukkan dalam hasil penelitian Apatinga et al. (2021) yang menyebutkan bantuan non tunai berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi negara melalui pajak. Kontribusi program BPNT yang menguntungkan masyarakat melalui pemberian jaminan ketersediaan kebutuhan pokok juga berdampak pada peningkatan pengelolaan ekonomi negara.

Jaminan negara terhadap ketersediaan kebutuhan pangan melalui bantuan non tunai memberikan dampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Kebutuhan terhadap barang kebutuhan pokok berimplikasi pada peningkatan permintaan barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perusahaan penyedia pangan. Peningkatan penjualan perusahaan swasta berkorelasi dengan peningkatan penerimaan pajak negara dari sektor swasta. Sobandi (2004) mengklaim bahwa arah kebijakan yang memanfaatkan keberadaan pihak swasta memberikan keuntungan lebih terhadap peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Terlebih, bantuan non tunai dalam bentuk kupon dapat mengurangi pengeluaran negara dalam bentuk uang tunai. Hal ini membantu negara untuk mengurangi pengeluaran yang dapat membantu meningkatkan surplus anggaran negara, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan program lainnya yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kutsuri et al., 2021).

Dalam aspek lain, keberadaan bantuan non tunai yang berupa pangan dapat memberikan dampak ekonomis pada masyarakat. Keluarga penerima manfaat pangan bisa menghemat biaya belanja yang disebabkan ketersediaan bahan makanan. Hal ini akan membantu mereka memiliki lebih banyak uang untuk kebutuhan lain. Ketersediaan uang tunai yang cukup memungkinkan untuk pengembangan usaha yang dapat membantu mencapai kemandirian finansial. Begitu juga, ketersediaan pangan yang bergizi dapat memberikan jaminan kecukupan kebutuhan gizi yang meningkatkan kesehatan masyarakat (Julianto, 2020). Dengan cakupan gizi yang baik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan potensi kerja lebih tinggi, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Peran program BPNT dalam peningkatan pengelolaan ekonomi negara menunjukkan signifikansi lain yang ditemukan di luar tujuannya untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Implementasi kebijakan bantuan non tunai yang memiliki dampak pada penguatan pengembangan ekonomi negara mencerminkan kebijakan yang saling menguatkan. Dampak saling menguatkan yang dihasilkan dalam suatu kebijakan disebut Llena-Nozal (2019) sebagai *virtuous circle* (lingkaran yang baik) yang menjadi dasar dari pembangunan ekonomi suatu negara. Ikatan saling ketergantungan antara kebijakan penyediaan kebutuhan ekonomi dengan pengembangan ekonomi negara mengindikasikan rancangan program berjalan beriringan antara kebijakan sosial dengan pertumbuhan ekonomi. Pertimbangan kesesuaian kebijakan sosial dan ekonomi berdampak pada pembentukan kesejahteraan yang berkelanjutan (Hirvilammi, 2020), sehingga peran sosial dalam program BPNT secara tidak langsung mendukung ekonomi negara.

Aspek kebijakan yang memenuhi *virtuous circle* dengan menyeimbangkan kebijakan sosial dalam program BPNT dengan keuntungan pengelolaan ekonomi negara ditinggalkan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti hanya memfokuskan pada mekanisme implementasi program (Djaenal et al., 2021; Hasimi, 2020; Julianto, 2020) dengan acuan pada aspek hambatan (Hutagalung et al., 2022) dan evaluasi efektivitas program (M. Noor et al., 2022; Parhusip, 2019; Rosaliana & Hardjati, 2019). Konstruksi dasar yang mencerminkan pertimbangan dalam pembuatan program diabaikan, sehingga kajian terhadap pelaksanaan program BPNT hanya mengarah pada proses evaluasi kebijakan. Keseimbangan pembuatan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial yang seimbang dengan peningkatan ekonomi negara mengantarkan pemahaman terhadap upaya serius pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah melalui program BPNT telah menjaga keseimbangan kebijakan dengan menghubungkan kebijakan sosial dengan kebijakan ekonomi sebagai pertimbangan dasar dalam pembuatan program. Pertimbangan untuk menjaga keseimbangan kebijakan sosial dengan kebijakan ekonomi berdampak pada kemanfaatan program terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi negara. Dalam pandangan Todaro (2014), pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, penghapusan kemiskinan, dan peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan. Hal ini dianggap penting karena jika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari

pembangunan ekonomi, maka mereka tidak akan mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keseimbangan antara aspek sosial dan ekonomi dalam pembangunan ekonomi menjadi penting agar program pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan aspek sosial maupun ekonomi dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi.

PENUTUP

Penerapan kebijakan pemerintah melalui program BPNT di Desa Kubang yang selama ini dianggap sebagai program yang membutuhkan pengawasan dalam tahap implementasinya mencerminkan konsep besar pengembangan ekonomi. Penelitian ini menemukan konsepsi dasar kebijakan sosial yang sirkuler dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi negara. Pelaksanaan bantuan dengan memanfaatkan unit usaha sebagai mitra yang mendistribusikan bantuan berupa bahan pangan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi negara melalui pajak. Implementasi program memberikan gambaran perhatian negara dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang kurang mampu sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kesenambungan kebijakan dalam aspek sosial dengan kebijakan ekonomi negara menunjukkan konsep kebijakan pertumbuhan ekonomi yang bersifat *virtuous circle*.

Kebijakan secara melingkar yang konstruktif sebagai identifikasi yang ditemukan dalam penelitian ini dihasilkan dari pembacaan implementasi program dengan menggunakan pendekatan Todaro dan Smith. Pendekatan ini memberikan penekanan pada arah kebijakan yang didasarkan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tumpuan kebijakan sosial masyarakat sebagai dampak dari upaya pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, penelitian ini menganalisis program BPNT hanya pada wilayah Desa Kubang yang dengan fokus pada relasi kebijakan sosial dengan kebijakan pengembangan ekonomi negara. Aspek lain yang berkaitan dengan pengembangan sosial ditinggalkan dalam penelitian ini, sehingga dapat membuka peluang bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apatinga, G. A., Asiedu, A. B., & Obeng, F. A. (2021). The contribution of non-cash remittances to the welfare of households in the Kassena-Nankana District, Ghana. *African Geographical Review*, 41(2), 214–225. <https://doi.org/10.1080/19376812.2020.1870511>

- Ariyanti, Kosim, A. M., & Yono. (2021). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat terhadap Tingkat Kesejahteraan Asnaf Gharimin di Masa Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 126–139. <https://doi.org/10.47467/ELMAL.V2I2.528>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STM YKPM.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Berita Resmi Statistik* (No. 56).
- Boston, J. (2019). Redesigning the Welfare State. *Policy Quarterly*, 15(1). <https://doi.org/10.26686/PQ.V15I1.5289>
- BPNT, T. P. P. P. (2017). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. TNP2K.
- Damima, J., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2022). Fungsi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Suatu Studi Kasus: Di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). *GOVERNANCE*, 2(1), 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/38095>
- Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Governance*, 1(2), 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/34844>
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2020). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 39–53.
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 81–94. <https://doi.org/10.24042/REVENUE.VII01.5762>
- Hirvilammi, T. (2020). The Virtuous Circle of Sustainable Welfare as a Transformative Policy Idea. *Sustainability*, 12(1), 391. <https://doi.org/10.3390/SU12010391>
- Hutagalung, J., Nofriansyah, D., & Syahdian, M. A. (2022). Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 6(1), 198–207. <https://doi.org/10.30865/MIB.V6I1.3478>
- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitingau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam : The Leader's Writing*, 1(1), 38–43. <https://doi.org/10.32939/QAWWAM.VIII.77>
- Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Cirebon. (2015). *Pemutakhiran Sanitasi Kabupaten Cirebon*. PPSP.
- Kharismawati, I. S., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui e-warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Publika*, 6(8). <https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V6N8.P>
- Kutsuri, G. N., Tinikashvili, T. S., Solyannikova, S. P., Milenkov, A. V., & Dzhonmamadov, S. B. (2021). Features of financial and credit regulation of the economy in the context of digitalization. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3487757.3490941>
- Llena-Nozali, A., Martini, N., & Murtini, F. (2019). The economy of well-being: Creating opportunities for people's well-being and economic growth. *OECD Statistics Working Papers 2019/02*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/498e9bc7-en>
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Under-Developed Regions*. Gerald Duckworth & co.
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *JURNAL*

- PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 15(2), 303–309. <https://doi.org/10.19184/JPE.V15I2.21327>
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Noor, M., Gata, W., Risnandar, R., Fakhrudin, F., & Novitarani, A. (2022). Optimization of Sentiment Analysis of Program Sembako (BPNT) Based on Twitter. *Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)*, 4(1), 223–234. <https://doi.org/10.37385/JAETS.V4I1.1006>
- Parhusip, J. (2019). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Desain Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika*, 13(2), 18–29. <https://doi.org/10.47111/JTI.V13I2.251>
- Pusat, T. K. R. (2011). *Pedoman Umum Raskin*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 1(2), 96–111. <https://doi.org/10.33005/PAJ.VII2.13>
- Škare, M., & Družeta, R. P. (2016). Poverty and economic growth: a review. *Technological and Economic Development of Economy*, 22(1), 156–175. <https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965>
- Smith, A. (2007). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (S.M. Soares (ed.)). MetaLibri Digital Library.
- Sobandi, B. (2004). Kebijakan Pengeluaran Pemerintah: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 1(3), 82–98. <https://doi.org/10.31113/JIA.VII3.342>
- Sombang, N. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/31971>
- Suliherni. (2020). *Wawancara*.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras Perum Polri.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT. (2019). *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. TNP2K.
- Todaro, M. P., & Smith, S. (2014). *Economic Development*. Prentice Hall.
- Toni. (2020). *Wawancara*.
- Wiratman, B. (1987). *Kemiskinan dan Pembebasan*. Kanisius.
- Yuyun. (2020). *Wawancara*.